



**INSPEKTORAT
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2020**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan "RENCANA KERJA PERUBAHAN INSPEKTORAT KOTA CIMAHI TAHUN 2021". Rencana Kerja (Renja) Perubahan disusun sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 Inspektorat Kota Cimahi.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan merupakan hal penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Output dan anggaran kegiatan dalam Renja disesuaikan dengan kebutuhan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kami mengharapkan semoga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan kinerja Inspektorat Kota Cimahi.

Cimahi, September 2021

 **INSPEKTUR KOTA CIMAHI**



Drs. IPUNG MUSTOPA, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650921 1990102 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2021	
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2021	5
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupten/Kota	
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6
b. Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	7
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	
a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	13
b. Kegiatan Penyelenggaraaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	15
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asisten	
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan	16

	Fasilitas Pengawasan	
	b. Pendampingan dan Asistensi	16
	B. Analisis Kinerja	21
	C. Capaian Renstra Tahun 2017 – 2022.....	29
	D. Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	32
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT	
	A. Tujuan	36
	B. Sasaran	37
	C. Strategi Pencapaian Sasaran	38
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT	
	A. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Rencana	
	1. Prioritas Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2021	39
	2. Program Kerja Inspektorat Kota Cimahi	40
	B. Rencana Kegiatan Tahun Rencana	
	I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45
	2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46
	3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47
	4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48
	5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49
	6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50
	7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50
	II. Program Penyelenggaraan Pengawasan	

	1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	52
	2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	54
III.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
	1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	55
	2) Pendampingan dan Asistensi	55
BAB V	PENUTUP	57

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan dengan Belanja Kegiatan TW III Tahun 2021	5
Tabel 2.2. Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi TW III Tahun 2021	18
Tabel 2.3. Rata-Rata Rasio Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2017-2023	30
Tabel 2.4. Pegawai Inspektorat Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	33
Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Inspektorat Kota Cimahi	37
Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Inspektorat	38

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan dengan Belanja Kegiatan TW III Tahun 2021	21
Grafik 2 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran per Program	21
Grafik 3 Perbandingan Persentase Realisasi Fisik Belanja Gaji dan Tunjangan dengan Belanja Kegiatan TW III Tahun 2021	22
Grafik 4 Perbandingan Persentase Capaian Realisasi Fisik per Program Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2021 TW III	22
Grafik 5 Sebaran Inspektorat Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, secara normatif telah ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Dari KKN, yang antara lain meliputi asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Salah satu tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan negara yang bersih dan bebas KKN, adalah melalui peranan lembaga pengawasan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Tahun 2021 disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) atau pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, transparan, bersih serta bertanggungjawab. Hal tersebut merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Penyusunan rencana kerja perubahan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2021 merupakan implementasi tahun ketiga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Cimahi. Tata cara mengenai penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kota Cimahi memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, kebutuhan dana/pagu indikatif serta menunjukkan prakiraan maju. Renja akan menjadi bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang akan dilaksanakan Inspektorat pada tahun anggaran 2021 berdasarkan acuan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022.

B. LANDASAN HUKUM

Inspektorat Kota Cimahi adalah unsur Pengawas Penyelenggara Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 Inspektorat Kota Cimahi secara hierarkis berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
22. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
23. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi pada Inspektorat Kota Cimahi;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Perubahan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2021 merupakan implementasi Renstra Tahun 2017-2022 yang menjadi pedoman bagi Aparat Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun. Berdasarkan pertimbangan ini maka maksud dan tujuan Renja Tahun 2022 mengacu pada Renstra Tahun 2017-2022 Inspektorat Kota Cimahi serta tabel 7.2 dan 8.2 RPJMD Perubahan tahun 2021-2022 yaitu:

- a. Menyediakan acuan resmi dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun.
- b. Memudahkan dalam mencapai tujuan dan target kinerja dengan melaksanakan program dan kegiatan.
- c. Memudahkan, memahami dan menilai program dan kegiatan operasional tahunan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
Mengemukakan Latar Belakang penyusunan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2021**
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Inspektorat Tahun 2021 dan realisasi Renstra serta capaian kinerja Inspektorat Tahun 2021, analisis kinerja pelayanan Inspektorat, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, serta hambatan dan solusinya.
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT**
Memuat penjelasan tentang tujuan dan sasaran Renja Perubahan Inspektorat serta penjelasan tentang strategi pencapaian sasaran Inspektorat Tahun 2021.
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT**
Memuat prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun rencana dan rencana kegiatan tahun rencana tahun 2021.
- BAB V : PENUTUP**

BAB II
HASIL EVALUASI
RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2021

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2021

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 maka dapat dilihat capaian dari alokasi dana yang telah dianggarkan untuk belanja gaji dan tunjangan. Perbandingan anggaran dan realisasi untuk belanja gaji dan tunjangan dijelaskan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Perbandingan Anggaran dan Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan dengan Belanja Kegiatan
TW III Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih	% Realisasi
A	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.395.623.407	4.848.601.045	2.547.022.362	65,56
B	Belanja Kegiatan	1,876,393,500	894,865,017	981,528,483	47,69
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.000.000	10.741.000	12.259.000	46,70
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.025.000	7.907.000	2.118.000	78,87
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.600.000	2.659.000	3.941.000	40,29
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.525.0000	1.653.000	1.872.000	46,89
5.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.750.000	33.660.000	90.000	99,73
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	194.259.000	95.040.000	4.369.900	94,34
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.205.400	72.835.500	28.767.800	71,68
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.665.400	46.697.835	17.967.565	72,21
9.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.378.800	14.766.700	5.612.100	72,46
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.147.000	31.580.000	45.567.000	40,93
11.	Pengadaan Mebel	5.162.000	4.950.000	212.000	95,89
12.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.675.000	49.000.000	28.675.000	63,08
13.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.800.000	18.790.991	22.009.009	46,06
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.077.900	151.623.583	52.454.317	74,30
15.	Penyediaan Jasa	124.720.000	66.788.712	57.931.288	53,55

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
16.	Pemeliharaan Mebel	5.875.000	0	5.875.000	0
17.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.750.000	60.194.348	33.555.652	64,21
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102.675.000	8.879.000	93.796.000	8,65
19.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	38.350.000	2.900.000	35.450.000	7,56
20.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	29.350.000	1.000.000	28.350.000	3,41
21.	Reviu Laporan Kinerja	44.800.000	17.499.000	27.301.000	39,06
22.	Reviu Laporan Keuangan	58.500.000	15.189.000	43.311.000	25,96
23.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	95.250.000	47.424.674	47.825.326	49,79
24.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	42.150.000	31.504.674	10.645.326	74,74
25.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	75.700.700	19.050.000	56.650.000	25,17
26.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	6.000.000	0	6.000.000	0
27.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	176.100.000	67.575.000	108.525.000	38,37
28.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	144.903.000	14.956.000	129.947.000	10,32
Jumlah Gaji dan Kegiatan		9,272,016,907	894,865,017	981,528,483	47,69

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan

: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Indikator Kinerja

: Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- Program

Indikator Kinerja

: Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan
- Indikator Kinerja Sub

: Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
- Kegiatan

Kelompok sasaran

: APIP
- Lokasi Kegiatan

: Kota Cimahi
- Kebutuhan dana Indikatif

: Rp. 23.000.000,00

- Sumber dana : APBD Kota Cimahi
- b. Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Indikator Kinerja : Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- Program
- Indikator Kinerja : Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kegiatan Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan
- Indikator Kinerja Sub : Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang Kegiatan disusun
- Kelompok sasaran : APIP
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
- Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 10.025.000,00
- Sumber dana : APBD Kota Cimahi

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Indikator Kinerja : Persentase pelayanan administrasi umum, Program kepegawaian dan keuangan
- Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Kegiatan yang tepat waktu
- Indikator Kinerja Sub : Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Kegiatan Tunjangan
- Kelompok sasaran : APIP
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
- Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 7.395.623.407,00
- Sumber dana : APBD Kota Cimahi
- b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Indikator Kinerja : Persentase pelayanan administrasi umum, Program kepegawaian dan keuangan
- Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Kegiatan yang tepat waktu
- Indikator Kinerja Sub : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan
- Kelompok sasaran : APIP

- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
- Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 6.600.000,00
- Sumber dana : APBD Kota Cimahi
- c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
- Indikator Kinerja : Persentase pelayanan administrasi umum, Program kepegawaian dan keuangan
- Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Kegiatan yang tepat waktu
- Indikator Kinerja Sub : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Kegiatan Semesteran
- Kelompok sasaran : APIP
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
- Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 3.525.000,00
- Sumber dana : APBD Kota Cimahi

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya
- Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Program
- Indikator Kinerja : Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya Kegiatan melalui pelayanan administrasi kepegawaian
- Indikator Kinerja Sub : Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kegiatan Perlengkapannya yang diadakan
- Kelompok sasaran : APIP
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
- Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 33.750.000,00
- Sumber dana : APBD Kota Cimahi
- b. Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Program

Indikator Kegiatan	Kinerja	: Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawaian
Indikator Kegiatan	Kinerja Sub	: Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Kelompok sasaran		: APIP
Lokasi Kegiatan		: Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif		: Rp. 194.259.000,00
Sumber dana		: APBD Kota Cimahi

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- | | | | |
|----|--------------------------|-------------|---|
| a. | Sub Kegiatan | : | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | Indikator Program | Kinerja | : Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan |
| | Indikator Kegiatan | Kinerja | : Jumlah set peralatan dan perlengkapan |
| | Indikator Kegiatan | Kinerja Sub | : Terpenuhinya kebutuhan ATK, Benda Pos, dan Alat Kantor Rumah Tangga |
| | Kelompok sasaran | | : APIP |
| | Lokasi Kegiatan | | : Kota Cimahi |
| | Kebutuhan dana Indikatif | | : Rp. 77.205.400,00 |
| | Sumber dana | | : APBD Kota Cimahi |
-
- | | | | |
|----|--------------------------|-------------|--|
| b. | Sub Kegiatan | : | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | Indikator Program | Kinerja | : Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan |
| | Indikator Kegiatan | Kinerja | : Jumlah bulan penyediaan administrasi umum |
| | Indikator Kegiatan | Kinerja Sub | : Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor |
| | Kelompok sasaran | | : APIP |
| | Lokasi Kegiatan | | : Kota Cimahi |
| | Kebutuhan dana Indikatif | | : Rp. 64.665.400,00 |
| | Sumber dana | | : APBD Kota Cimahi |

c. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Cetak Kantor dan Penggandaan

Indikator Kinerja : Persentase pelayanan administrasi umum, Program kepegawaian dan keuangan

Indikator Kinerja : Jumlah bulan penyediaan administrasi Kegiatan umum

Indikator Kinerja Sub : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan Kegiatan dan penggandaan

Kelompok sasaran : APIP

Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi

Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 20.378.800,00

Sumber dana : APBD Kota Cimahi

d. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Kinerja : Persentase pelayanan administrasi umum, Program kepegawaian dan keuangan

Indikator Kinerja : Jumlah bulan penyediaan administrasi Kegiatan umum

Indikator Kinerja Sub : Jumlah bulan Penyelenggara Rapat Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kelompok sasaran : APIP

Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi

Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 77.147.000,00

Sumber dana : APBD Kota Cimahi

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

Indikator Kinerja : Persentase pelayanan administrasi umum, Program kepegawaian dan keuangan

Indikator Kinerja : Jumlah set/unit BMD yang diadakan Kegiatan

Indikator Kinerja Sub : Jumlah set pengadaan mebel Kegiatan

- | | | |
|--------------------------|---|------------------|
| Kelompok sasaran | : | APIP |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Cimahi |
| Kebutuhan dana Indikatif | : | Rp. 5.162.000,00 |
| Sumber dana | : | APBD Kota Cimahi |
- b. Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Indikator Kinerja Program | : | Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : | Jumlah set/unit BMD yang diadakan |
| Indikator Kinerja Sub Kegiatan | : | Jumlah unit gudang yang disewa |
- | | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| Kelompok sasaran | : | APIP |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Cimahi |
| Kebutuhan dana Indikatif | : | Rp. 77.675.000,00 |
| Sumber dana | : | APBD Kota Cimahi |

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Indikator Kinerja Program | : | Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang |
| Indikator Kinerja Sub Kegiatan | : | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
- | | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| Kelompok sasaran | : | APIP |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Cimahi |
| Kebutuhan dana Indikatif | : | Rp. 40.800.000,00 |
| Sumber dana | : | APBD Kota Cimahi |
- b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Indikator Kinerja Program | : | Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang |

Indikator Kinerja Sub : Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Kegiatan Umum Kantor

Kelompok sasaran : APIP

Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi

Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 204.077.900,00

Sumber dana : APBD Kota Cimahi

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Indikator Kinerja : Persentase pelayanan administrasi umum, Program kepegawaian dan keuangan
- Indikator Kinerja : Jumlah set/unit BMD yang dipelihara Kegiatan
- Indikator Kinerja Sub : Jumlah unit kendaraan dinas operasional Kegiatan yang dipelihara
- Kelompok sasaran : APIP
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
- Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 124.720.000,00
- Sumber dana : APBD Kota Cimahi
- b. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel
- Indikator Kinerja : Persentase pelayanan administrasi umum, Program kepegawaian dan keuangan
- Indikator Kinerja : Jumlah set/unit BMD yang dipelihara Kegiatan
- Indikator Kinerja Sub : Jumlah set mebel yang dipelihara Kegiatan
- Kelompok sasaran : APIP
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
- Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 5.875.000,00
- Sumber dana : APBD Kota Cimahi
- c. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- | | | | |
|--------------------------|-------------|---|--|
| Indikator Program | Kinerja | : | Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan |
| Indikator Kegiatan | Kinerja | : | Jumlah set/unit BMD yang dipelihara |
| Indikator Kegiatan | Kinerja Sub | : | Jumlah set Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara |
| Kelompok sasaran | | : | APIP |
| Lokasi Kegiatan | | : | Kota Cimahi |
| Kebutuhan dana Indikatif | | : | Rp. 93.750.000,00 |
| Sumber dana | | : | APBD Kota Cimahi |
- d. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- | | | | |
|--------------------------|-------------|---|--|
| Indikator Program | Kinerja | : | Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan |
| Indikator Kegiatan | Kinerja | : | Jumlah set/unit BMD yang dipelihara |
| Indikator Kegiatan | Kinerja Sub | : | Jumlah gedung kantor yang dipelihara |
| Kelompok sasaran | | : | APIP |
| Lokasi Kegiatan | | : | Kota Cimahi |
| Kebutuhan dana Indikatif | | : | Rp. 102.675.000,00 |
| Sumber dana | | : | APBD Kota Cimahi |

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- a. Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- | | | | |
|--------------------|-------------|---|---|
| Indikator Program | Kinerja | : | Nilai Hasil Pengawasan |
| Indikator Kegiatan | Kinerja | : | Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT |
| Indikator Kegiatan | Kinerja Sub | : | Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan kinerja sesuai PKPT; Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai PKPT |
| Kelompok sasaran | | : | Perangkat Daerah |

- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
 Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 38.350.000,-
 Sumber dana : APBD Kota Cimahi
- b. Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 Indikator Kinerja : Nilai Hasil Pengawasan Program
 Indikator Kinerja : Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT Kegiatan
 Indikator Kinerja Sub : Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan Kegiatan aspek keuangan tertentu sesuai PKPT
 Kelompok sasaran : Perangkat Daerah
 Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
 Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 29.350.000,-
 Sumber dana : APBD Kota Cimahi
- c. Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja
 Indikator Kinerja : Nilai Hasil Pengawasan Program
 Indikator Kinerja : Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT Kegiatan
 Indikator Kinerja Sub : Jumlah Perangkat Daerah yang direviu dan Kegiatan dievaluasi kinerja sesuai PKPT
 Kelompok sasaran : Perangkat Daerah
 Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
 Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 44.800.000,-
 Sumber dana : APBD Kota Cimahi
- d. Sub Kegiatan : Reviu Laporan Keuangan
 Indikator Kinerja : Nilai Hasil Pengawasan Program
 Indikator Kinerja : Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT Kegiatan
 Indikator Kinerja Sub : Jumlah Perangkat Daerah yang direviu Kegiatan laporan keuangan dan dokumen keuangan lainnya sesuai PKPT

Kelompok sasaran : Perangkat Daerah
 Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
 Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 58.500.000,-
 Sumber dana : APBD Kota Cimahi

- e. Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil
- Indikator Kinerja

Program

Kinerja

:

Nilai Hasil Pengawasan
- Indikator Kinerja

Kegiatan

Kinerja

:

Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT
- Indikator Kinerja Sub

Kegiatan

Sub

:

Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi TLHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota Cimahi
- Kelompok sasaran : Perangkat Daerah
 Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
 Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 95.250.000,-
 Sumber dana : APBD Kota Cimahi

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- a. Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- Indikator Kinerja

Program

Kinerja

:

Nilai Hasil Pengawasan
- Indikator Kinerja

Kegiatan

Kinerja

:

Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT
- Indikator Kinerja Sub

Kegiatan

Sub

:

Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penanganan penyelesaian kerugian daerah sesuai PKPT
- Kelompok sasaran : Perangkat Daerah
 Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
 Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 42.150.000,-
 Sumber dana : APBD Kota Cimahi

- b. Sub Kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- Indikator Kinerja : Nilai Hasil Pengawasan Program
- Indikator Kinerja : Jumlah kegiatan pengawasan dengan Kegiatan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT
- Indikator Kinerja Sub : Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai PKPT.
- Kelompok sasaran : Perangkat Daerah
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
- Kebutuhan dana : Rp. 75.700.000,-
- Indikatif
- Sumber dana : APBD Kota Cimahi

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

- a. Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- Indikator Kinerja : Level Peningkatan Kapabilitas APIP Program
- Indikator Kinerja : Jumlah pranata kebijakan yang dihasilkan Kegiatan
- Indikator Kinerja Sub : Jumlah dokumen pendukung kebijakan Kegiatan pengawasan internal.
- Kelompok sasaran : APIP
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
- Kebutuhan dana : Rp. 6.000.000,-
- Indikatif
- Sumber dana : APBD Kota Cimahi

b. Pendampingan dan Asistensi

- a. Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Indikator Kinerja : Level Peningkatan Kapabilitas APIP

Program

Indikator Kinerja : Jumlah pranata kebijakan yang dihasilkan Kegiatan

Indikator Kinerja Sub : Jumlah kegiatan saber pungli yang Kegiatan difasilitasi dan fasilitasi korsupgah: Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Kelompok sasaran : APIP

Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi

Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 176.100.000,-

Sumber dana : APBD Kota Cimahi

b. Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Indikator Kinerja : Level Peningkatan Kapabilitas APIP

Program

Indikator Kinerja : Jumlah asistensi dan pendampingan yang Kegiatan dilaksanakan sesuai PKPT

Indikator Kinerja Sub : Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Kegiatan asistensi dan pendampingan PMPRB/ZI

Kelompok sasaran : Perangkat Daerah

Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi

Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 144.903.000,-

Sumber dana : APBD Kota Cimahi

Berdasarkan hasil capaian rincian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan rekapitulasi capaian program dan kegiatan dari realisasi alokasi anggaran fisik dan keuangan pada Inspektorat Kota Cimahi tahun anggaran 2021, terdiri dari anggaran belanja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Tabel 2.2
Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi
TW III Tahun 2021

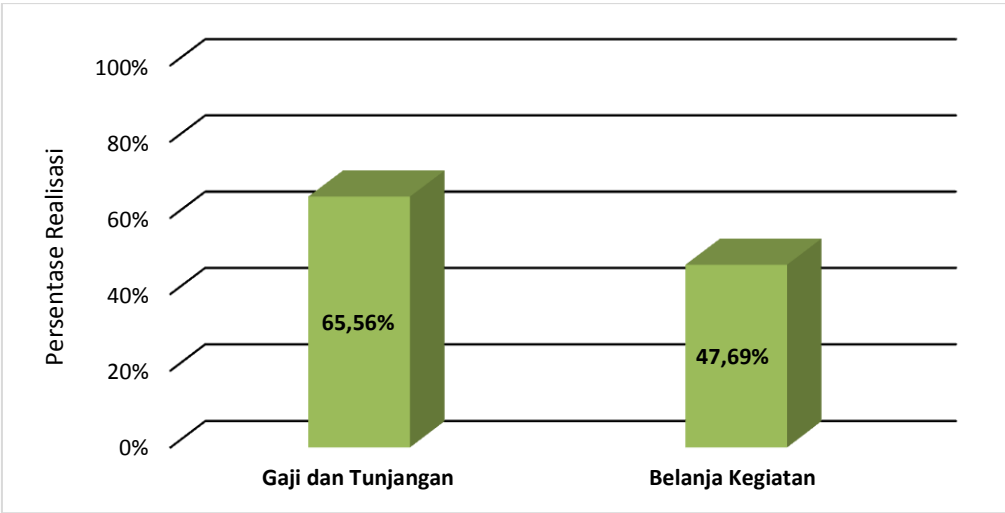
No		Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
I		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	23.000.000	10.741.000	100	46,70	81,57	
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.025.000	7.907.000	100	78,87	84,64	
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.395.623.407	4.848.601.045	100	65,56	78,60	
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.600.000	2.659.000	100	40,29	71,20	
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3.525.000	1.653.000	100	46,89	100	
	6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.750.000	33.660.000	100	99,73	100	
	7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	194.259.000	95.040.000	100	94,34	96,91	
	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.205.400	72.835.500	100	71,68	100	
	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.665.400	46.697.835	100	72,21	74,97	
	10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.378.800	14.766.700	100	72,46	77,80	
	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.147.000	31.580.000	100	40,93	90	
	12	Pengadaan Mebel	5.162.000	4.950.000	100	95,89	100	

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
13	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77.675.000	49.000.000	100	63,08	100	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.800.000	16.597.573	100	46,06	75	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.077.900	139.410.583	100	74,30	75,72	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan	124.720.000	65.003.712	100	53,55	68	
17	Pemeliharaan Mebel	5.875.000	4.950.000	100	98,89	100	
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.750.000	56.084.348	100	64,21	64	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102.675.000	8.879.000	100	8,65	100	
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan						
20	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	38.350.000	2.900.000	100	7,56	90,35	
21	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	29.350.000	1.000.000	100	3,41	100	
22	Reviu Laporan Kinerja	44.800.000	17.499.000	100	39,06	88,84	
23	Reviu Laporan Keuangan	58.500.000	15.189.000	100	25,96	91,24	
24	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	95.250.000	45.369.674	100	49,79	64,57	
25	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	42.150.000	29.044.674	100	74,74	75,80	
26	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	75.700.000	19.050.000	100	25,17	78,53	

No		Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
III		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi						
	27	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	6.000.000	-	100	0	33,33	
	28	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	176.100.000	67.575.000	100	38,37	90,12	
	29	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	144.903.000	14.956.000	100	10,32	96,89	
		JUMLAH	9.272.016.907	5.743.466.062	100			

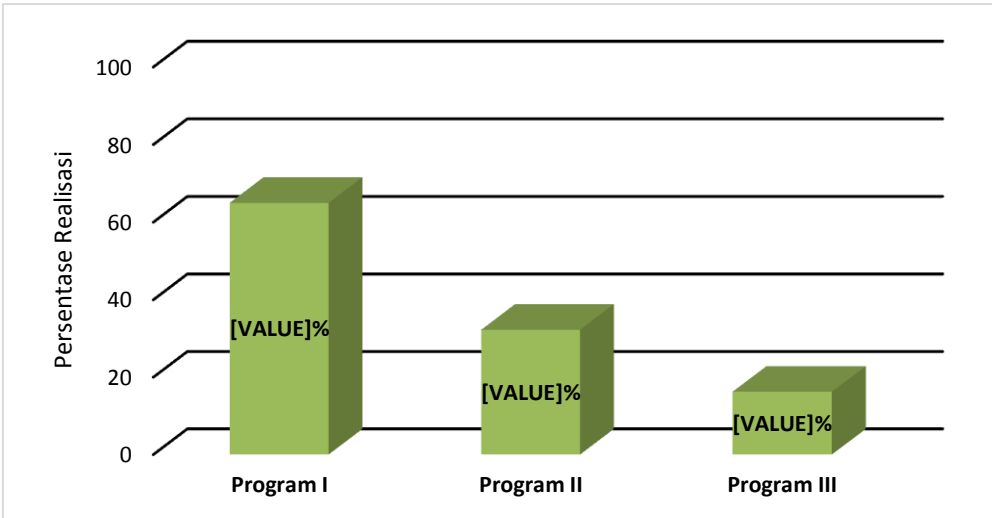
B. ANALISIS KINERJA

Berdasarkan tabel 2.1 maka dapat diketahui persentase (%) realisasi anggaran belanja gaji dan tunjangan dengan belanja kegiatan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2021 Triwulan III yang dijelaskan pada grafik 1 dan grafik 2.



Grafik 1. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan dengan Belanja Kegiatan TW III Tahun 2021

Dalam grafik 1 terdapat realisasi belanja gaji dan tunjangan sebesar 65,56%, terdapat anggaran sebesar 34,44 % yang belum direalisasikan. Sedangkan pada belanja kegiatan sebesar 47,69% dan 52,31% belum direalisasikan.



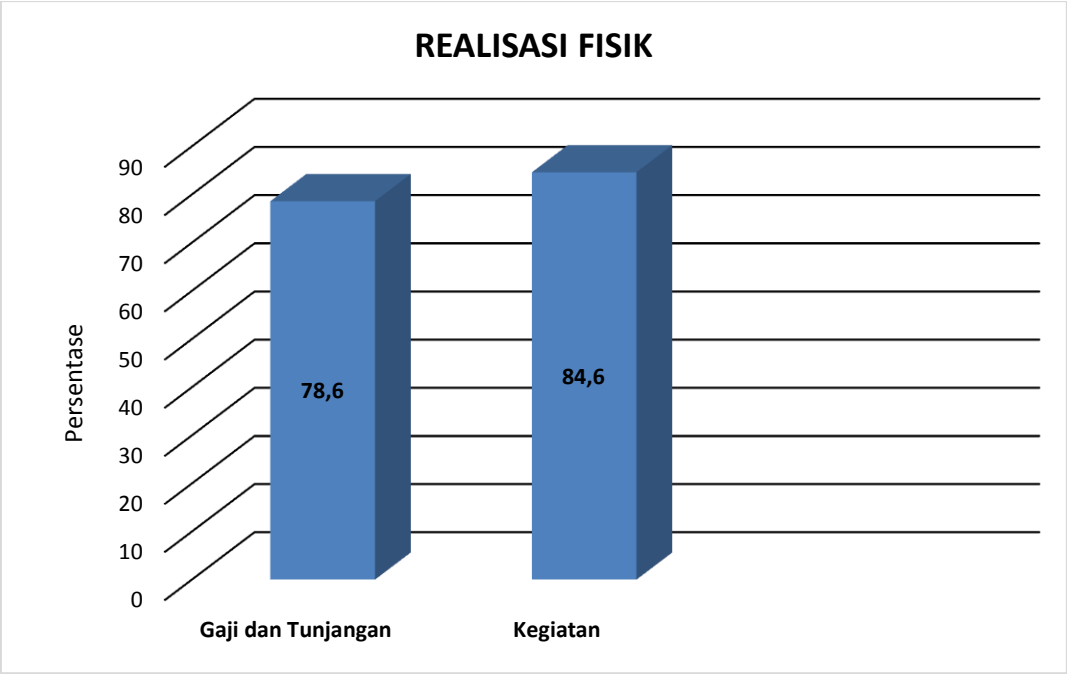
Grafik 2. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran per Program
Keterangan :

- I : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- II : Program Penyelenggaraan Pengawasan
- III : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

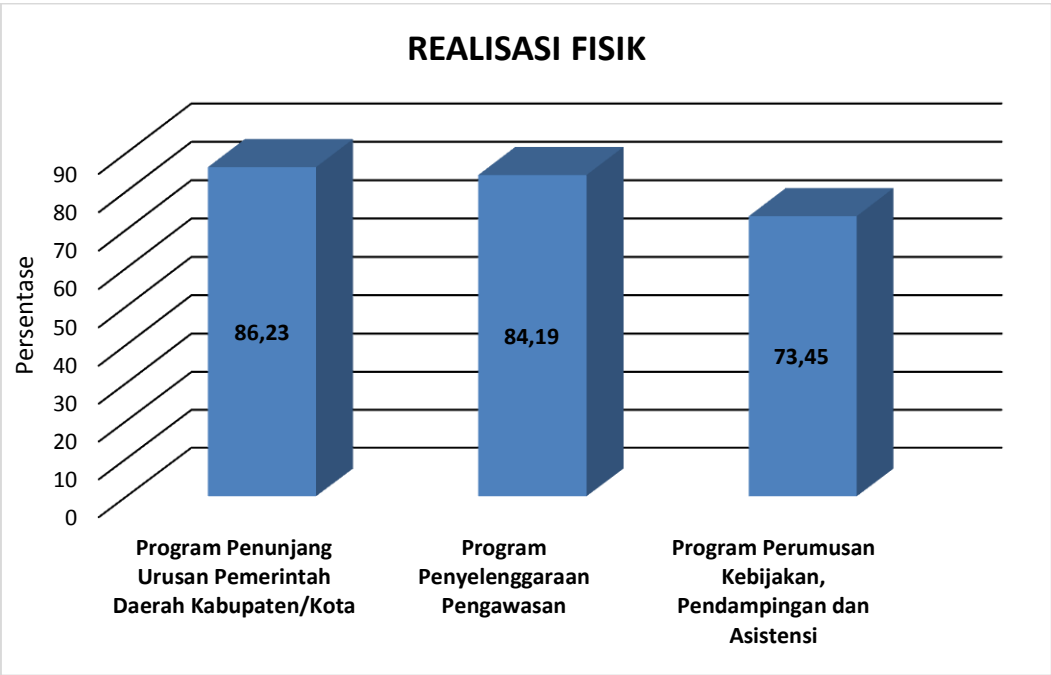
Grafik 2 menunjukkan rata-rata persentase realisasi anggaran per program belum memenuhi target di bawah 70%. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mencapai persentase tertinggi sebesar 64,96%, sedangkan realisasi

anggaran terendah pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yaitu 16,23 %.

Sedangkan untuk persentase (%) capaian realisasi fisik kegiatan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2021 TW III dijelaskan pada grafik 3 dan grafik 4.



Grafik 3. Perbandingan Persentase Realisasi Fisik Belanja Gaji dan Tunjangan dengan Belanja Kegiatan TW III Tahun 2021



Grafik 4. Perbandingan Persentase Capaian Realisasi Fisik per Program Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2021 TW III

Grafik 3 menunjukkan capaian realisasi fisik gaji dan tunjangan sebesar 78,6% sesuai kebutuhan pegawai. Sedangkan Grafik 4 yang menunjukkan persentase capaian realisasi fisik tertinggi sebesar 86,23% pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

MONEV RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN III

TAHUN 2021

**INSPEKTORAT PEMERINTAH DAERAH KOTA
CIMAHI**

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3						4	5	6						7	8	9	10						11
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	50%	-	-	-	92.86%	284%	Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Hasil Pengawasan	-	-	-	70%	-	-	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT	PD	6	11	6	4			
																Sub Kegiatan									
																Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1) Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan kinerja sesuai PKPT;	PD	-	-	-	1	-	-	
																	2) Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai PKPT	PD	-	32	-	9	-	-	
																Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan aspek keuangan tertentu sesuai PKPT	PD	-	5	-	-	-	-	
																Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang direviu laporan keuangan dan dokumen keuangan lainnya sesuai PKPT	PD	31	31	31	1	21	68%	Reviu RKPD, DAK, LPPD, Realisasi Penyerapan Anggaran, Realisasi PBJ, HPS, SHB, BMD, BTT

															Reviu Laporan Kinerja	Jumlah perangkat daerah yang direviu dan dievaluasi kinerja sesuai PKPT	PD	29	17	28	4	28	100%	Evaluasi LKIP dan Reviu SAKIP Kota, MONEV PPRG (4 PD driver), MONEV MR, Evaluasi SPIP (PD sample)	
															Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi TLHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota Cimahi	PD	28	28	28	28	28	100%	Evaluasi Temuan Berkala (Gelar Pengawasan); Monitoring TLHP per triwulan	
															Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT	Kegiatan	1	3	1	3	1	100%		
															Sub Kegiatan										
															Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penanganan penyelesaian kerugian daerah sesuai PKPT	PD	20	20	10	10	10	100%	Rekonsiliasi TPKD Kota Cimahi	
															Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai PKPT	PD	-	11	30	28	21	70%	Audit BOS (10 Sekolah), Audit Vaksin (10 Puskesmas dan DINKES,	
Meningkatkan implementasi SPIP	Nilai Maturitas SPIP	-	2	3	3	1.268	42.27%	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Peningkatan Kapabilitas APIP	2	3	3	3	3	100%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah pranata kebijakan yang dihasilkan	Dokumen	-	-	-	2	-	-	
															Sub Kegiatan										
															Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen pendukung kebijakan pengawasan internal	Dokumen	-	-	-	4	-	-		
															Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	4	4	4	4	4	100%		

																Jumlah asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan sesuai PKPT	Kegiatan	1	1	1	1	1	100%				
																Sub Kegiatan											
																Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan saber pungli yang difasilitasi dan fasilitasi korsupgah;	Kegiatan	4	4	4	4	4	100%	Telah dilaksanakan monitoring penindakan dan piket satgas saber pungli		
																Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kasus	-	1	1	-	1	100%				
																Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan PMPRB/ZI	PD	-	4	4	4	4	100%			
Tersedianya perencanaan, pelaporan dan capaian kinerja yang akuntabel	Persentase perencanaan dan laporan tepat waktu	25%	25%	25%	25%	25%	100%	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80	80	80	80	100%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Dokumen	3	3	4	2		0%			
																											Penyusunan Renja Perubahan, Rencana Aksi Perubahan, Dokumen LKIP Perubahan
																											Telah disusun dokumen monev Renaksi triwulan 3, Monev Renja TW II
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	25%	25	25	25			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan	25	25	25	25%			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Laporan	2	1	1	2	2	200%			
																Sub Kegiatan											

																Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Orang	32	32	32	32	32	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
																Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	-	-	1	-	-	
																Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan	1	2	1	2	1	100%	Telah disusun 1 dok Laporan Keuangan Triwulan 3
																Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	Bulan	3	3	3	3	3	100%	
																Sub Kegiatan									
																Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah set peralatan dan perlengkapan kapan	Set	8	-	-	-	-	-	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
																Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan bahan logistik kantor
																Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
																Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	3	3	3	3	3	100%	telah dilaksanakan 3 bulan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
																Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah set/unit BMD yang diadakan	Set/Unit	1	-	-	-	-	-	
																Sub Kegiatan									

																Pengadaan Mebel	Jumlah set pengadaan mebel	Set	1	-	-	-	-	-	Telah dilaksanakan Pengadaan Mebel (Kursi Rapat)
																Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang disewa	Unit	1	-	-	-	-	-	Telah dilaksanakan penyediaan gudang
																Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	Bulan	3	3	3	3	3	100%	
																Sub Kegiatan									
																Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan jasa telepon dan listrik
																Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
																Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah set/unit BMD yang dipelihara	Set/Unit	6	-	-	-	-	-	
																Sub Kegiatan									
																Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Unit	3	3	3	3	3	100%	telah dilaksanakan 3 unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional
																Pemeliharaan Mebel	Jumlah set mebel yang dipelihara	Set	2	2	2	2	0	0%	
																Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah set Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Set	11	11	11	11	5	45%	Service Komputer, Laptop
																Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	-	-	1	1	1	100%	Pengecatan dinding, pembuatan kanopi, perbaikan atap

																Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	45	-	-	-	-	-	
																Sub Kegiatan									
																Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	Set	45	-	-	-	-	-	Telah dilaksanakan pengadaan pakaian khusus inspektorat
																Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	35	35	35	35	35	100%	Telah dilaksanakan 35 orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

Dalam melakukan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2021 TW III, maka dilakukan pengukuran kinerja melalui perbandingan antara capaian kinerja dengan target kinerja dari masing - masing kegiatan sasaran strategik yang hendak dicapai dalam tahun 2021 TW III. Sehingga berdasarkan anggaran dapat diketahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Perhitungan pengukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja
JUMLAH	$\frac{\sum Rencana - (Rencana - Realisasi)}{\sum rencana} \times 100$	100 %	61,94%	81%

Untuk menentukan capaian kinerja sasaran dan kegiatan digunakan pengukuran melalui skala ordinal yaitu :

- 85 s/d 100 = sangat berhasil
- 70 s/d < 85 = berhasil
- 55 /d < 70 = cukup berhasil
- >55 = kurang berhasil

Secara umum pencapaian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) kegiatan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2021 diklasifikasikan mencapai capaian kinerja :

BERHASIL

DENGAN NILAI CAPAIAN KINERJA SEBESAR : 81 %

Capaian kinerja tersebut berdasarkan realisasi anggaran rata-rata sebesar 61,94%, sehingga terukur adanya efisien anggaran dengan capaian target kriteria berhasil.

C. CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2017-2022

Realisasi persentase capaian kinerja pada Renstra tahun ke-1 sampai dengan ke-5 atau Tahun Anggaran 2017 – 2022 mencapai 79,56%. Output atau kuantitas kinerja belum mencapai 100%.

Tabel 2.3.
Rata-Rata Rasio Capaian Kinerja Inspektorat
Tahun 2017-2023

No	Indikator Kinerja (output)	Target Renstra selama 5 thn	Realisasi Renstra selama 5 thn	% Rata-rata rasio capaian kinerja
I	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah			
	Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala			
1	Pemeriksaan reguler	200 LHP	195 LHP	98%
2	Pemeriksaan tertentu	40 LHP	0 LHP	0%
3	Monitoring dan Evaluasi	570 LHM	353 LHM	64%
4	Monitoring Banprov	50 LHM	55 LHM	110%
5	Reviu LKPD	5 LHR	5 LHR	100%
6	Reviu RKA	3 LHR	2 LHR	40%
7	Evaluasi LAKIP	200 LHE	201 LHE	101%
	Kegiatan penanganan kasus lingkungan pemerintah daerah			
8	Pemeriksaan Kasus /Khusus	70 LHP Kasus	46 LHP Kasus	61%
	Kegiatan tindak lanjut hasil temuan			
9	Tindak Lanjut LHP	421 BA	430 BA	102%
	Kegiatan pranata			
10	PKPT	5 dok	5 dok	100%
11	Arah Kebijakan/Jakwas	5 dok	1 dok	20%
12	Kode Etik	5 dok	1 dok	20%
13	Standar Audit	1 dok	3 dok	33%
14	POP	1 dok	3 dok	33%
15	Internal Audit Charter	1 dok	2 dok	50%
16	Pemetaan Profil SPIP Kota Cimahi	0	0	0%
17	Tes Diagnostik SPIP Kota Cimahi	0	0	0%
	Kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan			
18	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan/ Gelar Pengawasan	10 kali	10 kali	100%
II	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			
	Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			
19	PKS	155 orang	198 orang	128%
20	Diklat substantif pengawasan	25 orang	66 orang	264%
21	Diklat JFA	90 orang	5 orang	6%
22	Sosialisasi UU Pengawasan	60 orang	0	0%
III	Program pelayanan administrasi			

No	Indikator Kinerja (output)	Target Renstra selama 5 thn	Realisasi Renstra selama 5 thn	% Rata-rata rasio capaian kinerja
	perkantoran			
23	Pendistribusian Surat Keluar dan Surat Masuk	60 bulan	60 bulan	100%
24	Telepon, air dan Listrik	60 bulan	60 bulan	100%
25	Asuransi kendaraan bermotor	90 unit	89 unit	99%
26	Jasa Service penggantian suku cadang dan belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (revisi renstra)	90 unit	89 unit	99%
27	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	60 bulan	60 bulan	100%
28	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	60 bulan	60 bulan	100%
29	Alat tulis Kantor	60 bulan	60 bulan	100%
30	Barang Cetak dan Penggandaan	60 bulan	60 bulan	100%
31	Surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan	60 bulan	60 bulan	100%
32	Bahan Pokok/Natura	60 bulan	60 bulan	100%
33	Makanan dan minuman rapat dan tamu	60 bulan	60 bulan	100%
34	Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar daerah	60 bulan	60 bulan	100%
IV	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
	Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
35	Belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	1 paket	100%
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			
36	BBM dan Pelumas kendaraan	90 unit	89 unit	99%
V	Program peningkatan kapasitas sumber daya			
37	Sosialisasi Perundang-undangan untuk 60 orang	300 orang	365 orang	122%
38	Pembinaan Pegawai	155 orang	157 orang	101,%
39	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0%
VI	Program peningkatan disiplin aparatur			
40	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	250 stel	70 stel	28%
41	pengadaan pakaian KORPRI	155 stel	30 stel	19%
42	Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	155 stel	65 stel	42%
VII	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD			
43	Laporan Triwulan ,LAKIP, LKPI, LKPD	35 laporan	37 laporan	106%

No	Indikator Kinerja (output)	Target Renstra selama 5 thn	Realisasi Renstra selama 5 thn	% Rata-rata rasio capaian kinerja
	Kegiatan penyusunan laporan semesteran			
44	Menyusun Laporan Semesteran	10 laporan	18 laporan	180%

- Selama 5 tahun terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai rata-rata target Renstra yaitu :
1. Capaian Tingkat Maturitas SPIP belum level 3 berdasarkan Laporan Hasil *Quality Assurance* (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP karena pelaksanaan pengendalian intern belum terdokumentasikan dengan baik.
 2. Capaian Tingkat Kualitas APIP level 3 berdasarkan Laporan Hasil *Quality Assurance* (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP karena masih banyaknya dokumen yang dibutuhkan belum terpenuhi. Sampai bulan Desember 2021 Inspektorat Kota Cimahi sudah berupaya untuk memenuhi dokumen dimaksud (6 elemen). Kegiatan ini akan dilanjutkan pada awal tahun 2022 dengan mengajukan *Quality Assurance* (QA) ke BPKP.
 3. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Pada kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (Diklat Subtantif), karena disesuaikan dengan jumlah JFA yang akan meningkatkan jenjang fungsional.

D. ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

- Berdasarkan gambaran umum objek pemeriksaan terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah telah dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis internal dan eksternal yang dihadapi Inspektorat Kota Cimahi, yaitu :
1. Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 menurun menjadi nilai 65,07 atau predikat B. Peningkatan nilai yang diperoleh menjadi ukuran semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, walaupun belum dapat mencapai target RPJMD Kota Cimahi, yaitu tingkat akuntabilitas kinerja predikat BB.
 2. Tingkat kapabilitas APIP Inspektorat Kota Cimahi masih berada Level 2 pada tahun 2020, atau nilai 2,17 berdasarkan hasil evaluasi BPKP. Mengacu kepada RPJMN 2014-2019, Level Kapabilitas APIP seluruh kabupaten/kota harus berada pada Level 3 pada tahun 2022.
 3. Masih rendahnya nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kota Cimahi. Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2021 masih berada pada posisi

terendah di Jawa Barat dengan skor 1.2684. Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP terhadap 13 Perangkat Daerah sampel dengan skor 3,06, tetapi setelah dilakukan revidi oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat, Tingkat Maturitas SPIP Kota Cimahi berada pada kisaran skor 1.2684.

4. Penyelesaian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal sejak tahun 2004 belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti.

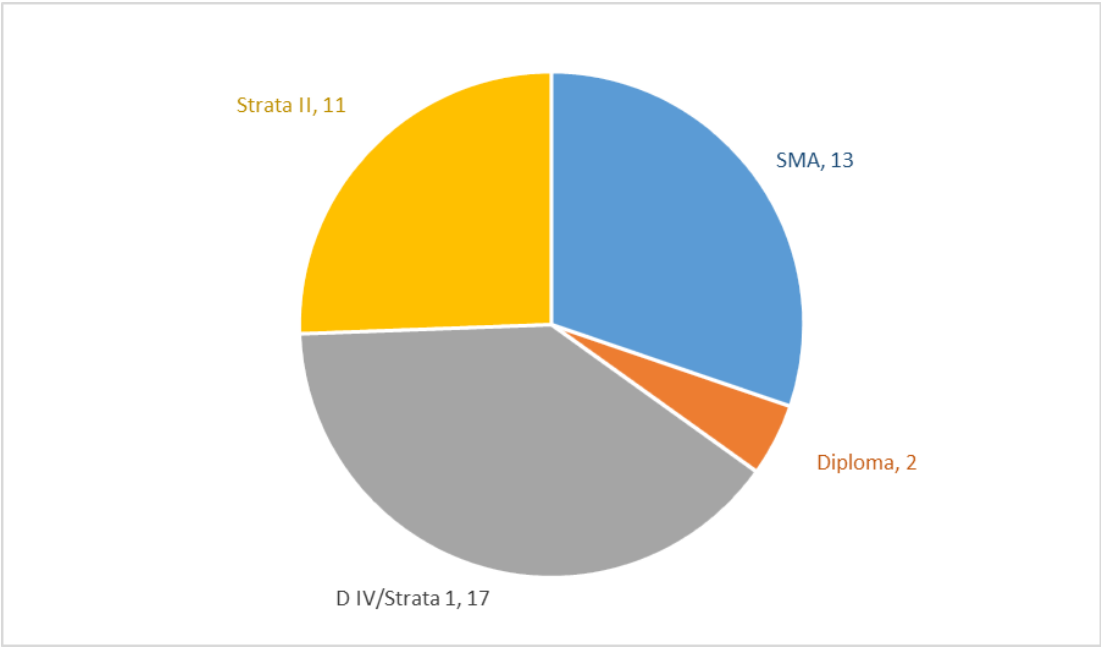
NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TELAH DITINDAKLANJUTI	TAHUN
1.	Inspektorat Kota Cimahi	25	15 (selesai)	Tahun 2016-2021
2.	Inspektorat Provinsi Jabar	19	12 (dalam proses)	Tahun 2013-2021
3.	BPKP	26	11	Tahun 2021
4.	BPK	726	719	Tahun 2004-2021

5. Penyelesaian Kerugian Daerah sampai dengan semester II tahun 2021 masih berkisar Rp. 3,474,609,143,00 (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
6. Masih kurangnya jumlah Jabatan Fungsional Auditor maupun Pengawas Pemerintahan (P2UPD). Kondisi saat ini, fungsional auditor sebanyak 14 (empat belas) orang Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan 3 (tiga) orang. Sementara kebutuhan JFT pada Inspektorat Kota Cimahi berdasarkan Analisis Beban Kerja minimal sebanyak 36 orang pegawai dengan sebaran jumlah tim sesuai dengan beban kerja pengawasan. Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Cimahi per Desember 2021, didukung oleh 43 pegawai yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) orang PNS dan 11(sebelas) orang Non PNS. Jumlah pegawai diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.4. dengan sebaran dijelaskan pada grafik 5.

Tabel 2.4
Pegawai Inspektorat Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah
1	SMA	2	11	13
2	Diploma	2	0	2
3	D IV/ Strata 1	17	0	17
4	Strata II	11	0	11
	Jumlah	32	11	43

Grafik 5
Sebaran Pegawai Inspektorat Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



7. Pembagian beban kerja pada level eselon IV yang belum berimbang terhadap urusan yang diampu oleh setiap jabatan eselon IV serta analisis beban kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pada hampir seluruh nomenklatur jabatan yang ada.
8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021 telah berbasis risiko namun dalam penentuan obyek pemeriksaan atau auditi belum sepenuhnya berdasarkan pada tingkat risiko yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah, karena profil risiko perangkat daerah yang dinilai belum matang dan belum lengkap.
9. Masih kurang optimalnya fungsi konsultansi Inspektorat Kota Cimahi, mengingat belum ditetapkannya standar pelayanan serta belum berfungsinya ruang konsultansi secara optimal.
10. Alokasi anggaran yang belum dapat memenuhi ketentuan dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyusunan RAPBD 2020, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah di atas Rp1.000.000.000.000,00 (Satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (Dua triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).

Isu-isu strategis Inspektorat tersebut dapat menghambat pencapaian target kinerja apabila tidak diatasi. Solusi atau upaya yang telah dan akan terus dilakukan untuk mengatasinya adalah :

1. Melakukan pendampingan pada tahapan proses evaluasi dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan SAKIP Kota Cimahi serta berkoordinasi dan konsultansi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Barat terkait proses evaluasi.

2. Melengkapi pemenuhan dokumen-dokumen pencapaian leveling kapabilitas APIP Level 2 menuju Level 3, melalui koordinasi secara intensif dengan BPKP Provinsi Jawa Barat serta meningkatkan kompetensi Auditor melalui Pendidikan dan Pelatihan.
3. Memberikan sosialisasi, bimbingan teknis serta pendampingan Maturitas SPIP terhadap Perangkat Daerah.
4. Menyusun rencana penyelesaian rekomendasi atas temuan secara intensif setiap triwulan dengan diawali pelaksanaan *desk* bagi Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi.
5. Mengintensifkan koordinasi dengan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Cimahi serta Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah.
6. Mengusulkan pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga fungsional auditor melalui *inpassing* ataupun pembentukan JFT.
7. Melakukan pendampingan penyusunan Profil Risiko (*Risk Register*) pada Perangkat Daerah sehingga dinilai matang dan lengkap serta dapat menjadi bahan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko.
8. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko pada akhir Tahun 2021 sehingga auditan yang ditentukan sesuai dengan tingkat risikonya.
9. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif kepada Perangkat Daerah dengan memberi ruang diskusi atau ruang konsultasi dan pendampingan.
10. Mengusulkan evaluasi kelembagaan untuk pemerataan beban kerja.
11. Mengusulkan penambahan alokasi anggaran, terutama untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas APIP.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

A. TUJUAN

Tujuan dan sasaran RPJMD sesuai misi 2 Wali Kota Cimahi yang terkait dengan Renstra Inspektorat yaitu :

Tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah “

Sasaran “Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah“ dan “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”.

Tujuan dan sasaran RPJMD disinergikan dengan tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Cimahi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, ekonomis, efisien, dan efektif yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik dapat tercapai, sebagaimana yang diamanatkan dalam misi 2 Wali Kota Cimahi.

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Cimahi pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja di masing-masing tujuan.

Kota Cimahi memiliki visi dan misi sebagai berikut :

VISI DAN MISI

Visi :

“ Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis dan Berbudaya”

Penjelasan :

Maju mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.

Agamis mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berbudaya mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan Visi dijabarkan dalam misi Wali Kota Cimahi yang harus dilaksanakan Inspektorat Kota Cimahi pada Misi 2 yaitu:

“Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik”

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Wali Kota Cimahi, maka Inspektorat menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pembina dan pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi serta sebagai penyelenggara tata kelola Pemerintahan Kota Cimahi yang baik, transparan dan akuntabel, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tugas dan Fungsi pada Inspektorat Kota Cimahi yang menyatakan bahwa kedudukan Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

B. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang telah spesifik, terukur dalam kurun waktu yang pendek. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 melalui kegiatan-kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.
- b. Meningkatkan implementasi SPIP

Tujuan dan sasaran Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Renstra Tahun 2017-2022, dijelaskan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Inspektorat Kota Cimahi

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Cimahi				
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK	Meningkatkan implementasi SPIP	Nilai Maturitas SPIP
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Persentase PD dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT yaitu *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan kedalam program dan kegiatan. Kesenambungan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dijelaskan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Inspektorat

Visi : Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis dan Berbudaya			
Misi II : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik			
Tujuan RPJMD : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah			
Sasaran RPJMD : - Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			
Strategi RPJMD : Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil
			Mengembangkan system pengawasan yang terintegrasi
	Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah		Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
			Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan barang milik daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

A. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN RENCANA

Uraian mengenai Prioritas Program Kerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2021 meliputi: Prioritas Pembangunan Kota Cimahi dan Program Kerja Inspektorat Kota Cimahi, yang kajiannya dikaitkan dengan kebijakan dan keadaan Kota Cimahi secara umum.

1. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA CIMAHI TAHUN 2021

Mengingat telah berakhirnya masa berlaku RPJMD Kota Cimahi tahun 2007-2012, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Renja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2021 mengacu pada RKPD Perubahan Kota Cimahi tahun 2021 yang berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kota Cimahi dan mengacu kepada RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Penyusunan RKPD Kota Cimahi Tahun 2021 juga akan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis, dengan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh PD serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Isu strategis pembangunan Kota Cimahi tahun 2021 sebagai berikut:

1. Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 serta Pemulihan Dampak Sosial dan Ekonomi.
2. Penanggulangan Kemiskinan.
3. Penanggulangan Pengangguran
4. Peningkatan Upaya Pemerataan Pendapatan
5. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
6. Peningkatan Keamanan, Kenyamanan, dan Keselamatan Bertransportasi
7. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
9. Optimalisasi Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
10. Optimalisasi Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan
11. Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

- 12. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat
- 13. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
- 14. Optimalisasi Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil serta Sektor Industri, Perdagangan dan Pariwisata dalam Perekonomian Daerah.
- 15. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan

2. PROGRAM KERJA INSPEKTORAT KOTA CIMAHI

Mengimplementasikan Misi 2 Wali Kota Cimahi, dengan kebijakan-kebijakan dalam RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan, bahwa Inspektorat Kota Cimahi merupakan Perangkat Daerah yang mengampu :

- 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.
- 2. Meningkatkan implementasi SPIP

Selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2019-2022 serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka dioperasionalkan dalam serangkaian program dan kegiatan Inspektorat Kota Cimahi yang selaras dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung program prioritas kota yaitu :

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
A	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	Sub Kegiatan
	a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
	b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
	c. Reviu Laporan Kinerja dan Keuangan
	d. Reviu Laporan Keuangan
	e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
	2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
	Sub Kegiatan
	a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
	b. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
B	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
	Sub Kegiatan
	a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
	2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
	Sub Kegiatan
	a. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
	b. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

C	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan
	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan
	a. Pengadaan Mebel
	b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	b. Pemeliharaan Mebel
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan
	a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

B. RENCANA KEGIATAN TAHUN RENCANA

Rencana anggaran perubahan kegiatan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 9.272.016.907,00. Uraian indikasi beserta rencana anggaran perubahan seluruh kegiatan pada Inspektorat Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari APBD Kota Cimahi sebagai berikut :

Matriks Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Inspektorat Kota Cimahi
Tahun 2021

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target	RENJA 2021	RENJA PERUBAHAN 2021	Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
INSPEKTORAT DAERAH			9,272,166,907	9,272,166,907	0	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8,560,913,907	8,724,220,907	163,307,000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			33,025,000	45,675,000	12,650,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen anggaran	4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan	23,000,000	23,000,000	0	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP, LPPD dan LKPJ	18 Dokumen	10,025,000	22,675,000	12,650,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,405,748,407	7,460,126,907	54,378,500	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	35 Orang	7,395,623,407	7,450,001,907	54,378,500	Penyesuaian gaji dan tunjangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	6,600,000	6,600,000	0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen laporan tahunan	13 Dokumen	3,525,000	3,525,000	0	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			228,009,000	229,719,000	1,710,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	45 set	33,750,000	33,750,000	0	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	35 Pegawai	194,259,000	195,969,000	1,710,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			239,396,600	238,281,100	-1,115,500	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor	5 Set	77,205,400	101,603,300	24,397,900	belanja alat listrik
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan	64,665,400	64,665,400	0	

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	20,378,800	25,762,400	5,383,600	penambahan karena terkait produk laporan yang meningkat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitas, Koordinasi, dan Konsultasi	12 Bulan	77,147,000	46,250,000	-30,897,000	ada kegiatan kunjungan pembahasaan ZI, PMPRB dan sokt baru dibagi 3 tim (tiap irban)/ 1 kali perjalanan (2 tujuan dalam 1 kali perjalanan)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			82,837,000	54,162,000	-28,675,000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Set Pengadaan Mebeulair	3 Set	5,162,000	5,162,000	0	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit fasilitas tempat yang disewa	1 Unit	77,675,000	49,000,000	-28,675,000	harga disesuaikan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			244,877,900	257,516,900	12,639,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Jumlah Bulan Jasa Listrik	12 Bulan	40,800,000	40,800,000	0	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan kebersihan kantor	12 Bulan	204,077,900	216,716,900	12,639,000	penyesuaian kebutuhan kantor yaitu penambahan alat rumah tangga dan kebersihan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			327,020,000	438,740,000	111,720,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan izin spektrumRadio (ISR)	3 Unit	124,720,000	124,720,000	0	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Set Pemeliharaan Mebel	2 Set	5,875,000	5,875,000	0	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Fasilitas Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	11 Unit	93,750,000	94,320,000	570,000	kekurangan penghitungan gaji tenaga pelayanan umum
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	102,675,000	213,825,000	111,150,000	belanja kanopi, ruang konsultasi dan display front office
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			384,250,000	254,465,000	-129,785,000	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal			266,400,000	182,020,000	-84,380,000	

					0	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1)Jumlah Perangkat Daerah Pemeriksaan Kinerja sesuai PKPT 2)Jumlah Perangkat Daerah yang di monitoring dan evaluasi sesuai PKPT	28 Perangkat Daerah 28 Perangkat Daerah	38,500,000	19,750,000	-18,750,000	karena pandemi, sehingga sspd dan mamin tidak terserap
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan aspek keuangan tertentu sesuai PKPT	5 Perangkat Daerah	29,350,000	8,000,000	-21,350,000	pengurangan mamin dan sspd/honor
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang direviu dan dievaluasi kinerja sesuai PKPT	28 Perangkat Daerah	44,800,000	26,800,000	-18,000,000	pengurangan mamin dan sspd/honor
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang direviu laporan keuangan dan dokumen keuangan lainnya sesuai PKPT	28 Perangkat Daerah	58,500,000	38,220,000	-20,280,000	pengurangan mamin dan sspd/honor
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi TLHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota Cimahi	28 Perangkat Daerah	95,250,000	89,250,000	-6,000,000	pengurangan mamin dan sspd/honor
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			117,850,000	72,445,000	-45,405,000	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penanganan penyelesaian kerugian daerah sesuai PKPT	20 Perangkat Daerah	42,150,000	43,095,000	945,000	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai PKPT	28 Perangkat Daerah	75,700,000	29,350,000	-46,350,000	pengurangan mamin dan sspd/honor
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			327,003,000	293,331,000	-33,672,000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			6,000,000	125,263,000	119,263,000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen pendukung kebijakan pengawasan internal	4 Dokumen	6,000,000	125,263,000	119,263,000	penyusunan pkpt dan profil risiko
Pendampingan dan Asistensi			321,003,000	168,068,000	-152,935,000	

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan saber pungli yang difasilitasi dan fasilitasi korsupgah Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan korsupgah/PMPRB/MR sesuai PKPT	6 Kegiatan 2 Kasus 28 Perangkat Daerah	176,100,000	133,360,000	-42,740,000	pengurangan mamin dan sppd/honor
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan penegakan integritas sesuai PKPT	28 Perangkat Daerah	144,903,000	34,708,000	-110,195,000	belanja jasa konsultasi Survei Penilaian Integritas di fasilitasi provinsi
			9,272,166,907	9,272,016,907	-150,000	

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a.

Sub Kegiatan

:

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Indikator Kinerja Program

:

Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- Indikator Kinerja Kegiatan

:

Jumlah dokumen perencanaan dan monev yang disusun
- Indikator Kinerja Sub Kegiatan

:

Jumlah dokumen anggaran

Jumlah dokumen Renja

Jumlah dokumen Renja Perubahan

Jumlah Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah
- Kelompok sasaran

:

APIP
- Lokasi Kegiatan

:

Kota Cimahi
- Kebutuhan dana Indikatif

:

Rp. 23.000.000,00
- Sumber dana

:

APBD Kota Cimahi
- b.

Sub Kegiatan

:

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Indikator Kinerja Program

:

Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- Indikator Kinerja Kegiatan

:

Jumlah dokumen perencanaan dan monev yang disusun
- Indikator Kinerja Sub Kegiatan

:

Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun

Kelompok sasaran	:	APIP
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 22.675.000,00
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| a. Sub Kegiatan | : | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Indikator Kinerja Program | : | Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : | Jumlah laporan administrasi keuangan yang tepat waktu |
| Indikator Kinerja Sub Kegiatan | : | Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan |
| Kelompok sasaran | : | APIP |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Cimahi |
| Kebutuhan dana Indikatif | : | Rp. 7.450.001.907,00 |
| Sumber dana | : | APBD Kota Cimahi |
-
- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| b. Sub Kegiatan | : | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| Indikator Kinerja Program | : | Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : | Jumlah laporan administrasi keuangan yang tepat waktu |
| Indikator Kinerja Sub Kegiatan | : | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun |
| Kelompok sasaran | : | APIP |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Cimahi |
| Kebutuhan dana Indikatif | : | Rp. 6.600.000,00 |
| Sumber dana | : | APBD Kota Cimahi |
-
- | | | |
|---------------------------|---|---|
| c. Sub Kegiatan | : | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| Indikator Kinerja Program | : | Persentase pelayanan administrasi |

	umum, kepegawaian dan keuangan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah laporan administrasi keuangan yang tepat waktu
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran
Kelompok sasaran	: APIP
Lokasi Kegiatan	: Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	: Rp. 3.525.000,00
Sumber dana	: APBD Kota Cimahi

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- | | |
|--------------------------------|--|
| a. Sub Kegiatan | : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya |
| Indikator Kinerja Program | : Persentase Peningkatan Kapasitas ASN |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : Jumlah laporan administrasi keuangan yang tepat waktu |
| Indikator Kinerja Sub Kegiatan | : Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan |
| Kelompok sasaran | : APIP |
| Lokasi Kegiatan | : Kota Cimahi |
| Kebutuhan dana Indikatif | : Rp. 33.750.000,00 |
| Sumber dana | : APBD Kota Cimahi |
-
- | | |
|--------------------------------|---|
| b. Sub Kegiatan | : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| Indikator Kinerja Program | : Persentase Peningkatan Kapasitas ASN |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : Jumlah laporan administrasi keuangan yang tepat waktu |
| Indikator Kinerja Sub Kegiatan | : Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| Kelompok sasaran | : APIP |
| Lokasi Kegiatan | : Kota Cimahi |
| Kebutuhan dana Indikatif | : Rp. 195.969.000,00 |

Sumber dana : APBD Kota Cimahi

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Indikator Kinerja Program : Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
- Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan administrasi umum
- Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor
- Kelompok sasaran : APIP
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
- Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 101.603.300,00
- Sumber dana : APBD Kota Cimahi
- b. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Indikator Kinerja Program : Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
- Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan administrasi umum
- Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor
- Kelompok sasaran : APIP
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
- Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 64.665.400,00
- Sumber dana : APBD Kota Cimahi
- c. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Indikator Kinerja Program : Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
- Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan administrasi umum
- Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan
- Kelompok sasaran : APIP
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi

Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 25.762.400,00
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi
d. Sub Kegiatan	:	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Kinerja Program	:	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah bulan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kelompok sasaran	:	APIP
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 46.250.000,00
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan	:	Pengadaan Mebel
Indikator Kinerja Program	:	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah set pengadaan mebeleir
Kelompok sasaran	:	APIP
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 5.162.000,00
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi
c. Sub Kegiatan	:	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator Kinerja Program	:	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah unit gedung yang disewa
Kelompok sasaran	:	APIP

Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 49.000.000,00
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Kinerja Program	:	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kelompok sasaran	:	APIP
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 40.800.000,00
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi
b. Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator Kinerja Program	:	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kelompok sasaran	:	APIP
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 216.716.900,00
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
-----------------	---	--

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator Kinerja Program	: Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah bulan pemeliharaan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara
Kelompok sasaran	: APIP
Lokasi Kegiatan	: Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	: Rp. 124.720.000,00
Sumber dana	: APBD Kota Cimahi
b. Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Mebel
Indikator Kinerja Program	: Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah bulan pemeliharaan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah set mebel yang dipelihara
Kelompok sasaran	: APIP
Lokasi Kegiatan	: Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	: Rp. 5.875.000,00
Sumber dana	: APBD Kota Cimahi
c. Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Kinerja Program	: Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah bulan pemeliharaan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah set Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
Kelompok sasaran	: APIP
Lokasi Kegiatan	: Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	: Rp. 94.320.000,00
Sumber dana	: APBD Kota Cimahi

d. Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
Indikator Kinerja Program	:	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah bulan pemeliharaan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara
Kelompok sasaran	:	APIP
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 213.825.000,00
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

a. Sub Kegiatan	:	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Program	:	Nilai Hasil Pengawasan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan kinerja sesuai PKPT; Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai PKPT
Kelompok sasaran	:	Perangkat Daerah
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 19.750.000,-
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi
b. Sub Kegiatan	:	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Program	:	Nilai Hasil Pengawasan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan aspek keuangan tertentu sesuai PKPT

Kelompok sasaran	:	Perangkat Daerah
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 8.000.000,-
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi
c. Sub Kegiatan	:	Reviu Laporan Kinerja
Indikator Kinerja Program	:	Nilai Hasil Pengawasan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Perangkat Daerah yang direviu dan dievaluasi kinerja sesuai PKPT
Kelompok sasaran	:	Perangkat Daerah
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp.26.800.000,-
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi
d. Sub Kegiatan	:	Reviu Laporan Keuangan
Indikator Kinerja Program	:	Nilai Hasil Pengawasan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Perangkat Daerah yang direviu laporan keuangan dan dokumen keuangan lainnya sesuai PKPT
Kelompok sasaran	:	Perangkat Daerah
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 38.220.000,-
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi
e. Sub Kegiatan	:	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Indikator Kinerja Program	:	Nilai Hasil Pengawasan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Perangkat Daerah yang

	dimonitoring dan dievaluasi TLHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota Cimahi
Kelompok sasaran	: Perangkat Daerah
Lokasi Kegiatan	: Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	: Rp. 89.250.000,-
Sumber dana	: APBD Kota Cimahi

2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- | | |
|--------------------------------|--|
| a. Sub Kegiatan | : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah |
| Indikator Kinerja Program | : Nilai Hasil Pengawasan |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai PKPT |
| Indikator Kinerja Sub Kegiatan | : Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penanganan penyelesaian kerugian daerah sesuai PKPT |
| Kelompok sasaran | : Perangkat Daerah |
| Lokasi Kegiatan | : Kota Cimahi |
| Kebutuhan dana Indikatif | : Rp. 43.095.000,- |
| Sumber dana | : APBD Kota Cimahi |
-
- | | |
|--------------------------------|---|
| b. Sub Kegiatan | : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu |
| Indikator Kinerja Program | : Nilai Hasil Pengawasan |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai PKPT |
| Indikator Kinerja Sub Kegiatan | : Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai PKPT. |
| Kelompok sasaran | : Perangkat Daerah |
| Lokasi Kegiatan | : Kota Cimahi |
| Kebutuhan dana Indikatif | : Rp. 29.350.000,- |
| Sumber dana | : APBD Kota Cimahi |

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

a. Sub Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
Indikator Kinerja Program	:	Level Peningkatan Kapabilitas APIP
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah pranata kebijakan pengawasan yang dihasilkan
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah dokumen pendukung kebijakan pengawasan internal.
Kelompok sasaran	:	APIP
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 125.263.000,-
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi

2) Pendampingan dan Asistensi

a. Sub Kegiatan	:	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Indikator Kinerja Program	:	Level Peningkatan Kapabilitas APIP
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan sesuai PKPT
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah kegiatan saber pungli yang difasilitasi dan fasilitasi korsupgah: Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan korsupgah/PMPRB/MR sesuai PKPT
Kelompok sasaran	:	APIP
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 133.360.000,-
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi
b. Sub Kegiatan	:	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Indikator Kinerja Program	: Level Peningkatan Kapabilitas APIP
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan sesuai PKPT
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan penegakan integritas sesuai PKPT
Kelompok sasaran	: Perangkat Daerah
Lokasi Kegiatan	: Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	: Rp. 34.708.000,-
Sumber dana	: APBD Kota Cimahi

BAB V

PENUTUP

Seiring dengan reformasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan penataan organisasi pemerintahan daerah, penyelenggaraan fungsi pengawasan pemerintah daerah menjadi salah satu obyek dalam proses tersebut. Salah satunya melalui pembagian kewenangan pengawasan dan penataan organisasi pengawasan internal di daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Inspektorat Kota Cimahi sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah.

Program Kerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan.
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan.
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan.

Anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 sebesar Rp. 9.272.016.907,00 terdiri dari belanja gaji dan belanja operasional.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2021 disusun, menuju peningkatan efektifitas dan efisiensi kegiatan yang selaras dengan target dan sasaran Perubahan Renstra serta sebagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Cimahi pada tahun 2022.